

	<b>News Title</b> : Perkuat Ekosistem, Bappebti Rancang Permendag PLK	
	<b>Media Name</b> : Wahananews.co	<b>Journalist</b> : Tumpal Alpredo Gultom
	<b>Publish Date</b> : 09 October 2023	<b>Tonality</b> : Positive
	<b>News Page</b> :	<b>News Value</b> : 0
	<b>Resources</b> : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Nirwala Dwi Heryanto (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Bappebti)	
	<b>Section/Rubrication</b> : Ekuin	<b>Topic</b> : Kolaborasi Pengembangan Ekosistem PLK

Wahana News > Ekuin

## Perkuat Ekosistem, Bappebti Rancang Permendag PLK

JP Sianturi - Ekuin

Senin, 09 Oktober 2023 - 00:01 WIB



Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko. [WahanaNews.co]

Ikuti Kami di:








**WahanaNews.co, Tuban** - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengajak pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem pasar lelang komoditas (PLK). Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi terwujudnya PLK sebagai salah satu instrumen perdagangan berjangka komoditas yang akan mengangkat unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut ditekankan Didid saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema 'Percepatan Penguatan Kebijakan Pasar Lelang Komoditas di Indonesia' yang diselenggarakan di Bali, Jumat, (6/10).

Acara dihadiri perwakilan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di antaranya Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jambi, Sulawesi Utara, Bali, dan Bangka Belitung. Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari [Bappebti](#), penyelenggara PLK, dan lembaga kliring.

"Salah satu indikator yang memengaruhi pengembangan dan pemanfaatan PLK adalah penguatan tataran regulasi. Ke depan, instrumen PLK sangat dibutuhkan untuk mendapatkan harga yang adil dan transparan bagi petani, nelayan, peternak dan masyarakat kecil serta menumbuhkan industri di dalam negeri. Untuk itu, perlu dipastikan mekanisme perdagangan berjalan kompetitif serta memberikan perlindungan masyarakat," jelas Didid.

**Baca Juga:**

**[Kemendag Optimis Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia Segera Terealisasi](#)**

Adanya Peraturan Presiden No 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam melakukan penguatan kebijakan dan menjadi dasar pengembangan PLK.

"Kementerian Perdagangan diamanahkan untuk menyusun peraturan turunan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Permendag akan mengatur Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan substansi teknis implementasi PLK, sebagaimana tertuang dalam Perpres tersebut," ungkap Didid.

Didid menerangkan, komoditas Indonesia sampai saat ini masih belum menjadi 'tuan' di negeri sendiri. Harga belum berpihak pada nelayan, petani, petambak yang merupakan penghasil komoditas. Oleh karena itu, Bappebti harus seimbang dalam mengatur petani, nelayan, peternak, masyarakat kecil serta pelaku industri.

"Dengan semangat itu Bappebti berusaha melakukan percepatan penyusunan Rancangan Permendag PLK agar instrumen ini berkontribusi lebih nyata dalam rantai perdagangan komoditas di Indonesia. Namun, upaya tersebut tidak akan terwujud tanpa kolaborasi dan peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur dan menjaga ekosistem PLK dan sistem resi gudang (SRG). Terselenggaranya PLK saja tidak cukup, harus berdampak lebih baik pada kesejahteraan masyarakat," tegas Didid.

Beberapa isu strategis substansi Rancangan Permendag PLK, antara lain jenis PLK, pengaturan mekanisme pembinaan/pengembangan PLK, kelembagaan, pembagian kewenangan pembinaan/pengembangan antara pemerintah pusat dan daerah, sinergitas kebijakan/ program antara pemerintah pusat dan daerah, potensi perdagangan komoditas melalui sinergi PLK dengan SRG dan pemetaan komoditas strategis untuk diperdagangkan melalui PLK.

Selain itu, Rancangan Permendag PLK juga akan mengatur pasar lelang spot dan forward yang melibatkan banyak penjual dan pembeli, penyelenggara lelang komoditas harus mendapatkan izin dari Bappebti dan pengawasan PLK juga menjadi perhatian dalam rancangan peraturan itu.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Heryono Hadi Prasetyo mengungkapkan, Rancangan Permendag PLK akan mengatur juga mutu komoditas dan grading komoditi yang akan ditransaksikan.

"Integrasi PLK dengan SRG akan didorong sebagai akses pasar komoditas yang disimpan di gudang SRG. Komoditas yang ditransaksikan melalui PLK termasuk standar mutunya akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari K/L, Pemda, Asosiasi, dan Pelaku Usaha," tandasnya.

[Redaktur: Tumpal Alpredo Gultom]